

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara tentang keturunan Tionghoa di Indonesia pada umumnya dan di kota Binjai khususnya, jarang sekali terdengar soal politik, mereka hanya melakukan peranan mereka di bidang ekonomi, khususnya di sektor perdagangan. Asumsi ini bertolak dari adanya anggapan bahwa Etnis Tionghoa mendominasi bidang itu. Orang-orang keturunan Tionghoa yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang enggan ikut secara aktif dalam bidang itu, hal mana disebabkan oleh pengalaman pahit yang dialami mereka pada tahun 1965 ketika meletusnya G 30 S yang pada saat itu diduga PKI lah dalang meletusnya peristiwa tersebut. Mereka yang ikut mendukung partai tersebut dituduh sebagai aktivis-aktivis PKI. Akibatnya, hingga saat ini mereka selalu dibayangi rasa takut. Artinya takut terlibat secara langsung kepada golongan ataupun partai-partai yang ada sekarang ini, karena mereka khawatir bahwa pengalaman masa lalu itu bisa terulang lagi.

Di zaman Orde Baru, keikutsertaan orang Tionghoa dalam politik tanah air nyaris tidak pernah didengar. Pada saat itu, geliat orang Tionghoa masih terbatas atau diposisikan pada segi bisnis, korporasi ekonomi, industri dan manufaktur, sedangkan dari segi politik, mereka masih enggan terlibat dan dilibatkan. Etnis Tionghoa pun agaknya membatasi dirinya dengan dunia politik.

Selama masa orde baru berkuasa etnis Tionghoa banyak diperlakukan dengan diskriminatif, baik dalam bidang politik maupun social budaya. Etnis tionghoa seperti lebih diarahkan kebidang ekonomi saja. Perlakuan diskriminatif politik dan budaya yang diberlakukan pada masa pemerintahan Orde Baru seperti adanya peraturan ganti nama yang diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet N0.127/U/Kep/12/1966, Inpres No.14/1967 yang mengatur perayaan keagamaan/tradisi yang membatasi hanya di lingkungan sendiri (bukan tempat umum), pengenalan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia(SKBRI), pemberian kode khusus pada KTP, belum lagi deraan berupa trauma politik yang dialami oleh etnis Tionghoa di masa Orde Baru bahkan di buat satu Badan Intelegen yang khusus bertugas mengawasi Masalah Tionghoa, yaitu Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC), suatu penamaan yang mengesankan bahwa kedatangan Tionghoa di Indonesia merupakan masalah. Hal ini menimbulkan sikap eksklusif, apatis dan isolatif bagi etnis Tionghoa dalam dunia politik.

Era reformasi yang berlangsung sejak 1998 memiliki arti tersendiri tidak hanya bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga bagi kalangan kelompok Etnis Tionghoa. Jika di era Orde Baru orang kelompok Etnis Tionghoa kurang memiliki ruang gerak untuk berekspresi, kecuali hanya berkuat di bidang ekonomi dan perdagangan, di era Reformasi kelompok Etnis Tionghoa mulai mendapatkan kebebasan sebagaimana etnis lain di Indonesia. Kalangan kelompok Etnis Tionghoa bebas dan berhak memasuki bidang apa saja, termasuk bidang kesenian sehingga mereka bebas menggelar pertunjukan barongsai, bahkan, mereka pun memiliki kebebasan yang sama dengan warga negara lain di Indonesia untuk

memasuki bidang politik yang di era Orde Baru ditabukan. Bahkan, kalangan kelompok Etnis Tionghoa bebas dan berhak mendirikan partai politik yang khusus membidik kalangan kelompok Etnis Tionghoa atau masuk menjadi bagian dari partai politik lain yang lebih inklusif (La Ode 2012: 133).

Sejak Mei 1998, Pemerintah Indonesia telah memberikan kebebasan kepada warga Indonesia etnis Tionghoa untuk berbicara terbuka, mendirikan partai politik, menjalankan dan mempraktekkan adat kebiasaan mereka secara terbuka. Pasca runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era Reformasi dijadikan momentum bagi orang Tionghoa membuka dan menyadarkan mereka akan pentingnya memperjuangkan aspirasi mereka melalui saluran-saluran politik. Hal ini didukung oleh iklim demokrasi yang lebih baik

Pada era Reformasi Pemerintah Gusdur dan Megawati menunjuk dan mengangkat Kwik Kian Gie menjadi salah satu kabinetnya yang berasal dari PDIP. Lain daripada itu setelah era Reformasi partai-partai lain pun mulai terbuka terhadap orang Tionghoa seperti PAN, PKB maupun PIB dan terakhir adalah Demokrat. Hal ini turut menandai membaiknya hubungan antar etnis di Indonesia setelah sekian lama terpolarisasi. *Sumber: (Pussisunimed's Blog).*

Bagaimana dengan Etnis Tionghoa di Binjai pada era Reformasi? Etnis Tionghoa di Binjai merupakan Etnis terbesar ke lima dari sepuluh Etnis terbesar di Binjai, setelah Jawa, Melayu, Mandailing dan Karo, yaitu sekitar 7,03 % dari jumlah seluruh penduduk kota Binjai. (Data Base Kota Binjai Tahun 2012, Bappeda Kota Binjai). Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar Etnis Tionghoa di Binjai bermata pencaharian sebagai seorang pedagang. Dalam dunia

politik, Etnis Tionghoa di Binjai mulai menunjukkan geliat untuk aktif berpolitik. Beberapa Etnis Tionghoa berpartisipasi dengan terjun sebagai anggota partai politik, dan mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislatif dan sebagian besar ikut aktif dalam pemberian suara pada pemilu dan pemilukada.

Salah satu masyarakat Etnis Tionghoa yang ikut andil dalam politik yaitu Peterus salah satu mantan anggota DPRD Binjai. Ada juga, Sukiwi Tjong yang merupakan mantan anggota DPRD Binjai yang juga merupakan tokoh masyarakat Tionghoa Binjai. Baru baru ini beliau hadir dalam sebuah pertemuan yang dihadiri warga Tionghoa yang mewakili 15 kecamatan sekota Binjai. Pertemuan tersebut adalah untuk menyambut kedatangan dan mendukung salah satu pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Binjai. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar dua ribuan warga Etnis Tionghoa. *Sumber: (harian Analisa, selasa 24 November 2015).*

Tak hanya itu, kaum muda etnis Tionghoa Binjai juga tak kalah aktif dalam politik. Baru baru ini juga mereka menggelar deklarasi pemberian dukungan kepada salah satu calon walikota dan wakil walikota Binjai, di kelurahan Kartini kecamatan Binjai Kota (Harian Analisa, 14 desember 2015).

Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat Etnis Tionghoa yang cukup besar dalam politik pada era reformasi ini.

Dari beberapa uraian di atas tentang perkembangan partisipasi politik etnis Tionghoa yang mengalami pasang surut, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana *Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilu Era reformasi di Kota Binjai*. Selain itu, peneliti juga ingin melihat

apa dasar dan motif penduduk etnis Tionghoa untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu yang selalu diselenggarakan oleh pemerintah pada kurun waktu lima tahun sekali ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Faktor pendorong dan penarik warga Etnis Tionghoa di Binjai ikut berpartisipasi dalam pemilu era Reformasi
2. Bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa di Binjai dalam pemilu era reformasi
3. Strategi Etnis Tionghoa dalam menentukan pilihan pada pemilu era reformasi di Kota Binjai

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian, maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu : *Partisipasi politik Etnis Tionghoa pada Pemilu Era reformasi di Kota Binjai"*



1.4. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah yang menjadi faktor pendorong dan penarik warga Etnis Tionghoa di Binjai ikut berpartisipasi dalam politik pemilu Era Reformasi
2. Bagaimana bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa di Binjai dalam Pemilu Era Reformasi?
3. Bagaimana strategi Etnis Tionghoa di Binjai dalam menentukan pilihan pada pemilu Era reformasi?

1.5. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan berpedoman kepada tujuannya, maka akan lebih mempermudah mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penarik warga Etnis Tionghoa di Binjai ikut berpartisipasi dalam politik terutama dalam pemilu Era Reformasi
2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa dalam pemilu Era Reformasi di Kota Binjai.
3. Untuk mengetahui strategi Etnis Tionghoa dalam menentukan pilihan pada pemilu Era Reformasi di Kota Binjai.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan peneliti tentang Partisipasi politik Etnis Tionghoa Binjai
2. Untuk menambah pengetahuan atau informasi bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum tentang Partisipasi politik Etnis Tionghoa Binjai
3. Memperkaya informasi bagi masyarakat umum mengenai Etnis Tionghoa dan partisipasinya dalam bidang politik.
4. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya jurusan Pendidikan Sejarah untuk dapat kiranya mengetahui dan memahami mengenai Etnis Tionghoa dan partisipasinya dalam bidang politik.
5. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.
6. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah.